

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Arief, B. N. (2008). Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan. Jakarta: Kencana.
- Arief, B. N. (2018). Cyber crime dan penegakan hukum di Indonesia. Semarang: Universitas Diponegoro Press.
- Atmasasmita, R. (2010). Teori dan kapita selekta kriminologi. Bandung: Refika Aditama.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2017). Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gosita, A. (1993). Masalah korban kejahatan: Kumpulan karangan tentang viktimologi dan pemidanaan. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Hadjon, P. M. (1987). Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu.
- Hamzah, A. (2008). Asas-asas hukum pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kevin, B. (2004). Disposable people: New slavery in the global economy. Berkeley: University of California Press.
- Marzuki, P. M. (2020). Penelitian hukum. Jakarta: Kencana.
- Moeljatno. (2002). Asas-asas hukum pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi. (1995). Kapita selekta sistem peradilan pidana. Bandung: Alumni.
- Muladi. (2002). Hak asasi manusia, politik, dan sistem peradilan pidana. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Rahardjo, S. (1980). Hukum dan masyarakat. Bandung: Angkasa.
- Rahardjo, S. (1983). Masalah penegakan hukum: Suatu tinjauan sosiologis. Bandung: Sinar Baru.
- Rahardjo, S. (2009). Penegakan hukum: Suatu tinjauan sosiologis. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rahardjo, S. (2010). Hukum progresif: Sebuah sintesa hukum Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing.

- Rahardjo, S. (2014). Hukum dalam jagat ketertiban. Bandung: UKI Press.
- Saleh, R. (1983). Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Jakarta: Aksara Baru.
- Soekanto, S. (1983). Pokok-pokok sosiologi hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S. (1992). Sosiologi: Suatu pengantar. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S. (1993). Efektivitas hukum dan peranan sanksi. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, S. (2008). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sudarto. (1986). Hukum dan hukum pidana. Bandung: Alumni.

B. Jurnal Ilmiah

- Anggraini, D. (2022). Perdagangan orang di era digital: Studi kasus prostitusi online melalui aplikasi MiChat di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(2), 198–215.
- Bahari, R., & Yuspin, W. (2023). Penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi online melalui aplikasi MiChat. *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, 14(1), 1–15.
- Rohmah, S. (2023). Modus operandi perdagangan orang melalui aplikasi daring. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Sosial*, 11(1), 39–52.
- Suzanalisa, & Nuraini Zachman “Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Prostitusi Online Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi”, *Jurnal Ilmiah*, Vol. 4 No. 2, 11 Desember 2020.
- Syaifulloh. (2022). Kejahatan prostitusi online dalam perspektif kriminologi. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 17(2), 175–190.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia. (2002). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2018). Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah.

D. Dokumentasi Resmi & Website

International Labour Organization. (2017). Global report on forced labour. Geneva: ILO.

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2023). Laporan pengawasan aplikasi berbasis lokasi tahun 2023. Jakarta: Kominfo RI.

United Nations. (2000). Protocol to prevent, suppress and punish trafficking in persons, especially women and children. Palermo: United Nations.

Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jambi. (2025). Laporan statistik tindak pidana perdagangan orang tahun 2021–2025 (Dokumen internal).

Wawancara dengan AKBP Yudhi Setyawan Wibowo, S.H., M.H., Kabag Binopsnal Ditreskrimum Polda Jambi, 09 Januari 2026

Wawancara dengan IPTU Ronal Prajaya, S.Kom, Kanit I Unit I Subdit IV Renakta Polda Jambi, 29 Januari 2026 pukul 11.00 wib